

dalam sejarah manusia. Padahal berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Poligami dipraktekan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami tersebut tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Setelah Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang yakni QS. An-Nisa' ayat 3. Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat yaitu membatasi jumlah istri dengan maksimal empat dan menetapkan syarat poligami yaitu mampu berlaku adil.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya perbedaan itu menonjol pada dua hal yaitu pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Selain itu ada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak

akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka poligami menjadi wajib atasnya.

Orang yang meneliti dalil-dalil ungkapan para ulama akan menemukan bahwa hukum pernikahan itu berbeda-beda dari satu kondisi ke kondisi yang lain, mungkin bisa wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram sesuai dengan keadaan seseorang. Begitupula dengan berpoligami hukumnya tergantung kondisi seorang laki-laki dalam kebutuhannya terhadap poligami dan kemampuannya memenuhi hak-hak istri-istrinya.⁵

Dalam memahami dasar hukum al-Qur'an dan al-Hadith, tentulah terdapat berbagai macam perbedaan pendapat, begitu pula dalam masalah poligami. Poligami merupakan sebuah produk pemikiran para ulama sebagai hasil dari *interpretasi* mereka terhadap al-Qur'an dan al-Hadith.

Berkaitan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadith yang berhubungan dengan poligami, saat ini paling tidak ada dua pendapat besar.⁶ Pendapat pertama, merupakan pendapat klasik yang masih mendominasi para pemegang otoritas hukum hingga saat ini. Mereka menekankan bahwa poligami itu betul-betul ada. Dan alasan untuk tidak melarang poligami barakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh pelaku poligami yang menyebabkan praktek poligami digugat. Oleh karena itu, poligami

⁵ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Keadilan Dalam, ...*, 32-33.

⁶ Haifaa A. Jawad, *Otentisasi Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 150.

salah satu istri dibandingkan kepada yang lainnya. Dikarenakan hal ini tidak sengaja oleh si suami, maka ia bukan kesalahannya dan tidak akan di minta pertanggung jawaban.

Siti aisyah telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعِدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا
قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau berkata: "Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu." Abu Daud berkata; yaitu hati.

Dalam kutipan Titik Triwulan Tutik dan Trianto disebutkan pendapat Syekh Mahmud Saltut, bahwa adil dalam ayat tersebut tidaklah seperti apa yang dipahamkan, yaitu adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atau tidak, karena hal itu mustahil dipenuhi oleh manusia. Namun adil dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu

¹¹Abū Dāwūd Sulaymān bin Al- Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol: 2 No: 2134 (Bayrūt: Al-Maktabah Al- 'Işriyyah Şaydā, t.th.), 242.

yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi ajaran.

- b. *Hifẓh al-nafs* (memelihara jiwa), Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan kemaslahatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab.
- c. *Hifẓh al-‘aql* (memelihara akal), akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu syari’at Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari’at Islam.
- d. *Hifẓh al-nasl* (memelihara keturunan), Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keluarga), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas

bahwa setiap sesuatu yang menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikategorikan sebagai *masalahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*.²⁰

Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam membagi masalahah menjadi dua macam, 1) masalahah dalam arti denotatif (*haqīqīy*) yakni kesenangan dan kenikmatan dan 2) masalahah dalam arti konotatif (*majāzīy*), yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Media tersebut tidak mesti berupa mashlahah, namun juga dapat berupa mafsadah. Sehingga meskipun dalam bentuk mafsadah, hal ini diperintahkan atau dibolehkan. Sebab dianggap sebagai sesuatu yang mampu mengantarkan kepada *masalahah* yang lebih agung.²¹

Kemaslahatan menurut al-Syatibi dilihat pula dari 2 sudut pandang yaitu *maqāshid al-syari’* (tujuan Tuhan) dan *maqāshid al-mukallaf* (tujuan mukallaf), *maqāshid syarī’ah dalam arti maqāshid al-syari’* mengandung empat aspek diantaranya adalah:²²

- a. Tujuan awal dari syari’at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.

²⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fih*, (Jakarta: Amzah, 2011),306.

²¹ Izz al-Din ibn ‘Add al-Salam, *Qawā’id al-Ahkāmfi Mashalih al-Anām*, juz I (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), 9.

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

fiqh Abdul Karim Zaidan mengemukakan bahwa *saddudz dzarī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.²⁶

2. Dasar Hukum *Saddudz dzarī'ah*

Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dzarī'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at menetapkan perintah dan menghantikan larangan. Ada yang dapat dikerjakan langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.

Sebagai contoh kewajiban mengerjakan shalat lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan shalat bila ia telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu tidak wajib, tetapi menentukan kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkan hukum wajib belajar shalat sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri. Adapun dasar hukum *saddudz dzarī'ah* ialah al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. Firman Allah Swt:

²⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 119.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS Al-An’am: 108).²⁷

Mencaci barthala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu kea rah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

b. Nabi Muhammad Saw bersabda:

الْأَوَّلَانِ جَمَى اللَّهِ مَعَا صِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (متفق عليه)

Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaanya. Barang siapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Ter...*, 141.

dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyari'atkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah menikah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalakinya dengan tiga talak.

Dari contoh di atas, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram). Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat *diyanaḥ* (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada *dzarī'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.

Tinjauan kedua, difokuskan pada segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya

pula (haram atau makruh). Sebagai contoh, seseorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang dalam hal ini.

Jika dengan tinjauan *dzarī'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua, perbuatan *dzarī'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadha'i*, di mana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bukan menimbulkan hukum boleh atau terlarang nya perbuatan tersebut, tergantung pada apakah perbuatan *dzarī'ah* tersebut menimbulkan dampak *masalahah* atau *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.³¹

4. *Saddudz dzarī'ah* Sebagai Hujjah

Dalam buku karangan Firdaus yang mengutip beberapa ulama mendapatkan perbedaan pendapat dalam menjadikan *saddudz dzarī'ah* sebagai hujjah atau dalil menetapkan hukum. Kalangan Malikiyah dan

³¹ Ibid, 239.

dengan perantara jual beli sepeda motor itu, pihak B memperoleh uang sebanyak empat juta rupiah dan nanti padawaktu yang telah ditentukan harus membayar kepada A sebesar lima juta rupiah. Dalam fiqh jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-'ainah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ulama sepakat menetapkan perbuatan seperti ini terlarang apabila terlihat indikasi bahwa mereka yang melakukannya berniat melakukan riba. Namun, ulama berbeda pendapat dalam hal tidak ditemukan indikasi yang jelas mereka berniat melakukan riba, tetapi hanya sekedar helah menghindar dari riba.

Dalam kasus terakhir ini, kalangan Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang. Mereka memandang penetapan dilarang atau tidaknya suatu perbuatan tidak cukup hanya diukur dengan bentuk formal suatu perbuatan, tetapi perlu juga mempertimbangkan akibat dari perbuatan itu. Pada jual beli itu dicurigai maksudnya, meskipun mereka tidak menyatakan sebagai upaya menghindar dari riba secara formal, meskipun secara esensial mereka tetap terjerumus ke dalamnya.

Menurut kalangan Hanafiyyah, jual beli yang demikian menjadi *fasid* (rusak), tetapi bukan karena *saddudz dzarī'ah*, melainkan karena

Depresi adalah gangguan alam perasaan yang berat dan dimanifestasikan dengan gangguan fungsi social dan fisik yang hebat, lama dan menetap pada individu yang bersangkutan.

Depresi merupakan suatu jenis alam perasaan atau emosi yang disertai komponen psikologik, seperti rasa susah, murung, sedih, putus asa, dan tidak bahagia. Gangguan akibat depresi dan stres bisa mengganggu kesehatan seseorang, baik secara fisik dan mentalnya. Bila dibiarkan berkelanjutan, depresi sangat berpengaruh terhadap penurunan kondisi tubuh secara fisik, gangguan kesehatan mental akut yang akan menjadikan seseorang menjadi gila, bahkan sampai bisa terjadi resiko kematian.